

# ARAHAN ALOKASI LAHAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOGOR DALAM RANGKA MID TERM REVIEW RTRW 2016-2036

Valentin Retnowati Christin Zai dan Suprajaka  
Universitas Esa Unggul  
Korespodensi: valentinrczai@gmail.com

## Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, pada tahun 2015 melakukan peninjauan kembali RTRW dan membentuk peraturan daerah baru dan pada tahun 2021 RTRW Kabupaten Bogor akan melakukan peninjauan kembali. Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur), hal ini menunjukkan Kabupaten Bogor akan terus berkembang dari aspek kependudukan dan kebutuhan lahan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi besaran perubahan penggunaan lahan dan daya tampung lahan, menganalisis dampak perkembangan penduduk dan kebutuhan lahan permukiman dan mengenalisis ketersediaan lahan permukiman serta alokasi lahan permukiman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam analisis proyeksi penduduk, perhitungan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, kebutuhan lahan permukiman, daya tampung lahan dan neraca sumberdaya lahan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan perkembangan penduduk di Kabupaten Bogor terus meningkat yang diikuti dengan kebutuhan lahan permukiman. Hal ini menyebabkan daya tampung lahan Kabupaten Bogor di beberapa kecamatan berada di ambang batas dan terdapat 7 kecamatan yang memiliki daya tampung lebih. Dalam analisis neraca perubahan penggunaan lahan menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan menjadi permukiman terus meningkat sesuai dengan Peta Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2005, 2010 dan 2015. Alokasi ruang untuk lahan permukiman Kabupaten Bogor pada tahun 2036 terbagi atas 2 kelas, Kelas I memiliki kriteria yang memenuhi untuk menampung penduduk dan Kelas II untuk menampung serta mengarahkan penduduk yang berkembang didaerah padat penduduk. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor tidak diarahkan menjadi alokasi ruang permukiman karena berada wilayah yang memiliki daya tampung lebih, tidak memiliki luasan lahan kering, maupun perkebunan yang diarahkan untuk permukiman serta berada di kawasan lindung.

**Kata Kunci:** Alokasi Lahan Permukiman, Daya Tampung Lahan, Penduduk, Perubahan Penggunaan Lahan, Lahan Permukiman

## Abstract

Bogor Regency Regulation Number 19 of 2008 concerning the Bogor Regency Spatial Planning for 2005-2025, in 2015 reviewing the RTRW and forming new regional regulations and in 2021 the RTRW of Bogor Regency will conduct a review. Bogor Regency is an area with hierarchical urban development and establishment, formed by a network system between rural and urban activities internal and external areas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak and Cianjur (Jabodetabekpunjur), this shows that Bogor Regency will continue to develop in terms of population and land needs. Based on this the purpose of this study is to identify the magnitude of changes in land use and land capacity, analyze the impact of population development and residential land needs and identify the availability of residential land and settlement land allocation. The research method used is quantitative descriptive analysis of population projections, calculation of population pressure on agricultural land, land capacity and land resource balance. Based on the results of an analysis conducted population development in Bogor Regency continues to increase followed by the need for residential land. This causes the Bogor Regency land capacity in some districts is at the threshold and there are 7 districts that have more capacity. In the analysis of land use change balance sheet shows that changes in land use into settlements continue to increase in accordance with the Map of Land Use Change in 2005, 2010 and 2015. Space allocation for residential areas in Bogor Regency in 2036 is divided into 2 classes, Class I has criteria that meet to accommodate the population and Class II to accommodate and direct the population that is developing in densely populated areas. Some sub-districts in Bogor Regency are not directed towards the allocation of settlement space because they are in areas that have more capacity, do not have dry land area, or plantations that are directed to settlements and are in protected areas.

**Keywords:** Residential land allocation, Land Capacity, Population, Changes in Land Use, Settlement Land